

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

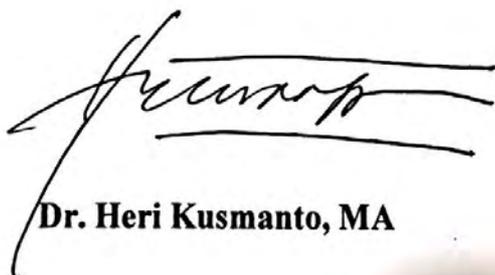
**Judul : Efektifitas Pemberian Dana Hibah pada Sekolah
Yayasan/Lembaga Raudhatul Athfal Bina Kreatif di Kecamatan
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang**

Nama : Rosida Sitorus

NPM : 181801046

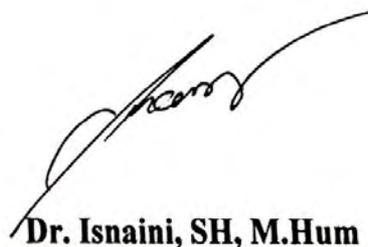
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Abdul Kadir, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Rosida Sitorus

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN DANA HIBAH PADA SEKOLAH
YAYASAN/LEMBAGA RAUDHATUL ATHFAL BINA
KREATIF DI KECAMATAN BATANG KUIS
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

OLEH

**ROSIDA SITORUS
NPM. 181801046**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN DANA HIBAH PADA SEKOLAH
YAYASAN/LEMBAGA RAUDHATUL ATHFAL BINA
KREATIF DI KECAMATAN BATANG KUIS
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ROSIDA SITORUS
NPM. 181801046**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Efektifitas Pemberian Dana Hibah pada Sekolah
Yayasan/Lembaga Raudhatul Athfal Bina Kreatif di Kecamatan
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang**

Nama : Rosida Sitorus

NPM : 181801046

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heri Kusmanto, MA

Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Abdul Kadir, M.Si

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 27 Agustus 2020

Nama : Rosida Sitorus

NPM : 181801046



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Sekretaris : Dr. Adam, MAP

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Materai
6000

Rosida Sitorus

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PEMBERIAN DANA HIBAH PADA SEKOLAH YAYASAN/LEMBAGA RAUDHATUL ATHFAL BINA KREATIF DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh :

Nama : Rosida Sitorus
NPM : 181801046
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah dan kendala kendala pemberian dana Hibah untuk pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif pendekatan investigasi dan wawancara dengan mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi di Sekolah Yayasan/Lembaga Raudhatul Athfal Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian bahwa manfaat pemberian dana hibah kurang efektif dan kendala dalam pelaksanaan permohonan hibah memerlukan proses waktu yang sedikit lama, karena melewati beberapa tahap. Dan menyebabkan proses pencairan dana hibah yang harus dilalui memerlukan tahapan-tahapan. Hal ini akan mempengaruhi kelengkapan berkas dan laporan pertanggung jawaban.

Kata kunci : Efektivitas, manfaat dana hibah

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF GRANTING FUNDS TO RAUDHATUL ATHFAL BINA CREATIVE SCHOOL FOUNDATIONS/INSTITUTIONS IN BATANG KUIS DISTRICT DELI SERDANG REGENCY

By :

Nama : Rosida Sitorus
NPM : 181801046
Study Program : Master of Science Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

The study aims to determine how effective and constraints are the constraints in granting grants to RA Bina Kreatif Educational Institutions/Foundations in Batang Kuis District, Deli Serdang Regency. This study uses a descriptive qualitative approach to investigative approaches and interviews by collecting data by face-to-face and interacting at the Raudhatul Athfal Bina Kreatif Foundation/Institution School in Batang Kuis District, Deli Serdang Regency.

The results of the study show that the benefits of grants are less effective and the constraints in implementing grant applications require a rather long process of time, because they pass several stages. And it causes the grant disbursement process to go through requiring stages. This will affect the completeness of the files and accountability reports.

Key words: *Effectiveness, benefits of grant funds*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya. Atas karunia dan pertolongan-Nya juga disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang diciptakan Allah SWT, sebagai *rahmatan lil'alami* dan menjadi *uswatun hasanah* bagi setiap muslim yang beriman.

Di tesis ini berjudul **"Efektifitas Pemberian Dana Hibah Pada Sekolah Yayasan/Lembaga Raudhatul Athfal Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang"**. Diajukan sebagai tugas akhir sekaligus persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik di Pascasarjana Universitas Medan Area Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian di tesis ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah berperan serta memberi dorongan moral dan spiritual sehingga penulis tetap semangat dan dapat menyelesaikan disertasi ini. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ayah dan Bunda Tercinta serta yang selalu memberikan doa dan dukungan serta nasehat yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Suamiku Tercinta serta anak-anak tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta semangat yang membuat penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, MSc, M. Eng.

4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS
5. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
6. Pembimbing I, Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan penyusunan tesis ini.
7. Pembimbing II, Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, yang sudah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama mengikuti sampai menyelesaikan studi.
8. Teman-teman mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, yang saling dukung dan memberikan semangat selama ini dalam menjalani masa studi.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Agustus 2020

Penulis

Rosida Sitorus

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	6
1.3. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial	8
2.2. Pengertian Hibah	12
2.3. Tujuan Pemberian Hibah	15
2.4. Bentuk Hibah	16
2.5. Pemanfaatan.....	17
2.6. Kriteria dan Mekanisme, Pemberian Bantuan Hibah Berbentuk Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	20
2.7. Konsep Pemberdayaan dan Strategi Pemberdayaan.....	23
2.8. Evaluasi.....	24
2.9. Sistem Informasi	28
2.10. Efektivitas	30
2.11. Efektivitas Pelayanan Publik	32
2.12. Efektivitas Pelayanan	35

2.13. Teori Penetapan Tujuan (<i>Good Setting Theory</i>).....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	38
3.2. Sumber Data	38
3.3. Teknik Pengumpulan Data	39
3.4. Teknik Analisis Data	40
3.5. Pengujian Keabsahan Data	42
3.6. Lokasi dan Jenis Penelitian	43
3.7. Sumber Data dan Informan Penelitian	43
3.8. Kerangka Pikir	44
3.9. Kajian Penelitian Terdahulu	45
3.10. Kategorisasi Penelitian	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian	51
4.1.1. Profil Yayasan Raudhatul Athfal Bina Kreatif	51
4.2. Hasil Penelitian	55
4.2.1. Manfaat pemberian dana hibah untuk sekolah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.....	56
4.2.2. Respon Sekolah RA Bina Kreatif tentang Pemberian Dana Hibah untuk Sekolah.....	61
4.3. Pembahasan	63
4.3.1. Efektifitas Pemanfaatan pemberian dana hibah untuk sekolah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif di Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang	63
4.3.2. Kendala-kendala dalam Pemanfaatan Dana Hibah oleh sekolah RA Bina Kreatif pada pemberian dana hibah untuk sekolah	66

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	72
5.2.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Yayasan Raudhatul Athfal Bina Kreatif	54
Gambar 2 Refrensi Data Yayasan	54
Gambar Model Wilbur Schrammn (Komunikasi Interaksional)	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun, permasalahan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian maka, diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, amanatnya bahwa rakyat terlantar dipelihara oleh negara, serta

negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksudkan diatas, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan bantuan dana hibah untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan akuntabel Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2018. Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua Permendagri tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 15 februari 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Acuan formal tersebut memberi sinyal kepada pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola dana hibah sehingga anggaran yang terserap dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Fenomena mengenai kurang dan tidak efektifnya bantuan berbentuk uang yang dimohonkan adalah sebesar Rp.82.430,000,-sesuai dengan permohonan kepala Raudhatul Athfal dengan Permohonan Rencana Anggaran Biaya :

No Urut	Nama Bahan	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Semen	60 sak	50.000	3.000.000
2	Batu bata	20.000	500	10.000.000
3	Pasir	5 cold disel	500.000	2.500.000
4	Besi 10 ml	20 batang	90.000	1.800.000
5	Batu kerikil	2 cold disel	800.000	1.600.000
6	Batu pavinblok	5.000	1.200	6.000.000
7	Pagar besi	1	4.500.000	4.500.000
8	Ayunan Besi Bulat	1	2.000.000	2.000.000
9	Bola Dunia	1	1.670.000	1.670.000
10	Perosotan	1	1.500.000	1.500.000
11	Lemari	2	1.000.000	2.000.000
12	Mandi Bola	3000 bola kecil	500	1.500.000
13	Bak mandi bola	2	700.000	1.400.000
14	Kanopi halaman kelas luar	90 meter	250.000	27.000.000
15	Estimasi upah tukang 3 minggu	24 hari	320.000	7.680.000
16	Kursi siwa	40 buah	20.000	800.000
17	Meja siswa	20 buah	70.000	1.400.000
18	Whiteboard	2 buah	915.000	1.830.000
19	Meja guru	2 buah	1.000.000	2.000.000
20	Kursi guru	4 buah	300.000	1.200.000
21	Papan perancah	5 lembar	120.000	600.000
22	Kayu 2x3	5 batang	90.000	450.000
Jumlah				82.430.000

Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 188.44/76/KPTS/2019 Tanggal 18 Februari 2019 Nomor urut 1229 atas Raudhatul Athfal Bina Kreatif Desa Tanjung Sari Jl. Batang Kuis - Lubuk Pakam Dusun II Tanjung Sari Kec. Batangkuis Kab. Deli Serdang hanya dapat membantu Sebesar Rp.70.000.000,- dengan peruntukan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didapatkan dan di manfaatkan dana semaksimal mungkin yaitu dengan Rencana Anggaran Biaya yang disetujui biaya :

No Urut	Nama Bahan	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Semen	60 sak	50.000	3.000.000
2	Batu Bata	20.000 buah	500	10.000.000
3	Pasir	5 cold	500.000	2.500.000
4	Besi	10 mili	90.000	1.800.000
5	Batu Kerikil	2 cold diesel	800.000	1.600.000
6	Batu Pavinvblok	5000 buah	1.200	6.000.000
7	Pagar Besi	1 buah	4.670	4.670.000
8	Kanopi	90 m	300.000	27.000.000
9	Papan perancah	5 lembar	120.000	600.000
10	Kayu 2x3	5 btg	90.000	450.000
11	Meja Guru	2 buah	1.000.000	2.000.000
12	Kursi Guru	4 buah	300.000	1.200.000
13	Perosotan	1 buah	1.500.000	1.500.000
14	Upah Tukang	3 org	320.000 x 24 hari	7.680.000
Jumlah				70.000.000

Berdasarkan uraian diatas,maka peneliti melihat dana hibah yang di dapat tidak efektif karna pihak lembaga atau yayasan tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhan lembaga Raudhatul Athfal Bina kreatif yang sangat membantu proses belajar mengajar yang seyogyanya mengadakan antara lain:

No Urut	Nama Bahan	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ayunan Besi Bulat	1	2.000.000	2.000.000
2	Bola Dunia	1	1.670.000	1.670.000
3	Lemari	2	1.000.000	2.000.000
4	Mandi Bola	3000 bola kecil	500	1.500.000
5	Bak mandi bola	2	700.000	1.400.000
6	Kursi siwa	40 buah	20.000	800.000
7	Meja siswa	20 buah	70.000	1.400.000
8	Whiteboard	2 buah	915.000	1.830.000
Jumlah				12.430.000

Walaupun tidak sepenuhnya disetujui karena kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas. Seharusnya dengan dana hibah yang terbatas itu para penerima Dana Hibah dapat memaksimalkan penggunaannya, sehingga

pemanfaatannya walaupun terbatas tapi dapat secara efektif bermanfaat bagi penerima. Kenyataannya Ketua Raudhatul Athfal Bina Kreatif memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan yang lebih efektif dan memaksimalkan anggaran yang ada. Dalam pemanfaatan perlu diadakan evaluasi yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) yang tidak memberikan hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan pemberian tersebut tercapai sesuai yang diharapkan. organisasi tidak tercapai.

Alasan dari ketidak efektifan tersebut diindikasikan terjadi karena 1) Adanya penggunaan yang tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan. 2) Pemanfaatan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 3) Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat. Sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan penerimaan Dana hibah untuk sekolah kepada penerima hibah, kepada lembaga Pendidikan dan yayasan tidak optimal, maka fungsi atau pemanfaatan tidak diselenggarakan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bagaimana melihat manfaat yang diberikan kepada yayasan pendidikan dan perlu memeberikan tanggapan berupa evaluasi dan masukan dari penerima manfaat serta keberuntutkannya. Maka peneliti ingin melihat dan memewancarai secara subjektif dan memberikan judul “Efektivitas Pemberian Dana hibah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan adalah:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan pemberian dana hibah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pemanfaatan dana hibah oleh lembaga/yayasan RA Bina Kreatif pada pemberian dana hibah Lembaga/yayasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan yang telah dirumuskan maka dapat ditetapkan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa efektifkah pemberian dana Hibah untuk pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui respon Dana hibah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan serta menyempurnakan

teoriteori tentang komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok serta dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi peneliti yang lain dalam hal strategi komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dalam memperdalam ilmu komunikasi serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahan Kecamatan Batang Kuis. Menambah wawasan tentang strategi komunikasi dalam melakukan kegiatan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan dan dapat mengaplikasikan teoriteori agar supaya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan di Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial

Pengertian hibah dan bantuan Sosial Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah pusat atau Pemda lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan , Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pemberian hibah memenuhi paling sedikit 3 kriteria yaitu :

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- c. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Hibah dapat diberikan kepada
 - 1) Pemerintah
 - 2) Pemda Lainnya
 - 3) Perusahaan Daerah
 - 4) Masyarakat
 - 5) Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor

13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi
 - 1) Memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - 4) Sesuai tujuan penggunaan.

Arti sosial dalam pembahasan ini ada 2 macam, yaitu: sosial secara umum dan sosial organisasi Sosial secara umum dapat diartikan suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai banyak kemurniannya. Sebagai contoh: Suatu organisasi

sosial atau non- organisasi (sosial pribadi) bekerja lebih menekankan pada kegiatan sosial tanpa pamrih yang benar-benar tulus keluar dari hati nurani yang paling dalam. Kegiatan tersebut dapat berupa penanggulangan bencana alam, kecelakaan sesaat, anak terlantar atau anak jalanan dan fakir miskin. Mereka memberikan bantuan tersebut tidak ada tendensi apapun untuk menjadikan agar nama mereka terkenal. Sosial organisasi disini diartikan melakukan suatu kegiatan sosial dengan menampung bantuan yang diorganisir oleh pihak tertentu dan terkadang dipolitisir untuk mencari sensasi misalnya menjadikan orang tersebut terkenal atau dijadikan idola dan cenderung bermuatan politik.

Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini mekanisme tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi sehingga upaya pemberian bantuan tidak terjadi *overlooping* atau ada data-data yang tidak terdeteksi. Dalam penyampaian bantuan tersebut kita harus mendata semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian data yang diperoleh merupakan data yang akurat sehingga dapat dijadikan untuk membuat database. Dengan database tersebut kita dapat membuat semacam kartu pintar (*smart card*) yang memiliki fasilitas untuk memperoleh bantuan secara benar dan tidak dapat disalahgunakan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya.

Sistem kartu tersebut menggunakan sistem autentikasi yang tidak dapat digunakan oleh orang lain. Sehingga bantuan akan bisa diprogram dari pusat data sesuai dengan dana yang dimiliki badan sosial tersebut dan kebutuhan masyarakat yang akan dibantu. Sebagai contoh jika data yang terhimpun cukup besar maka sistem dapat diprogram sesuai dengan persediaan, sedangkan apabila dana terbatas sistem dapat diprogram seminimal mungkin sehingga dapat diperlakukan

dengan adil dan merata. Dari sisi si pemberi dana, agar orang yang mampu bersedia memberikan bantuan kepada badan sosial tersebut, pemerintah turut berperan dalam hal ini misalnya bagi pengusaha yang menyisihkan pendapatannya kepada badan sosial maka dia akan diberi potongan pembayaran pajak berapa % dari pendapatannya dan mendapatkan kemudahan birokrasi dalam mengurus sesuatu. Agar itu dapat berjalan kita perlu juga mendata pengusaha-pengusaha yang ada atau orang yang dianggap mampu untuk memberikan bantuan, kemudian dibuatkan databasenya dan diberikan kartu sebagai donator dari badan sosial tersebut.

2.2. Pengertian Hibah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain kata

hibah memiliki 2 (dua) makna, yaitu hibah antar personal sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hibah terkait dengan keuangan daerah, sesuai dengan objek tulisan hukum ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1666 KUH Perdata, menyatakan hibah/penghibahan (schenking) adalah suatu persetujuan/perjanjian (overseenkomst) dengan/dalam mana pihak yang menghibahkan (schenker), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (omniet) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan/melepaskan sesuatu benda kepada/ demi keperluan penerima hibah (begiftigde) yang menerima penyerahan/penghibahan itu.
- 2) Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf PP Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secara terus menerus.

- 3) Pasal 42 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberianhibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 4) Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- 5) Buletin Teknis Nomor 4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, menyatakan bahwa hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- 6) Buletin Teknis Nomor 13 SAP tentang Akuntansi Hibah, yang menyatakan bahwa belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Maka hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.3. Tujuan Pemberian Hibah

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Asas- asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif;
- 2) Asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- 3) Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat;
- 5) Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.4. Bentuk Hibah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PPKD merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.
- 2) Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Hibah berupa barang dan/atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan belanja yang

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

2.5. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata ‘Manfaat’, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa : Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna . Dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yakni : Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima) . Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yaitu :

- Adanya oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek media massa.
- Sedangkan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.

Dan jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai brosur sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publiknya yakni pelanggan yang merupakan salah satu dari publik eksternalnya. Dari pemanfaatan brosur sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik, diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan yang berguna bagi publik yang membacanya, yang dalam hal

ini adalah para pelanggan dari *Carrefour*. Sehingga pelanggan menjadi tahu tentang produk-produk yang ditawarkan perusahaan melalui brosur.

1. Tujuan Pemanfaatan Basis Data. Tujuan Pemanfaatan Basis data yaitu :

1) Kecepatan dan Kemudahan (*speed*). Yakni agar pengguna basis data bisa:

- ✓ menyimpan data
- ✓ melakukan perubahan/manipulasi terhadap data
- ✓ menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa (baik manual ataupun elektronik).

2) Efisiensi Ruang Penyimpanan (*Space*). Dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi (pengulangan) data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan/batasan (*constraint*) tipe data, domain data, keunikan data dsb.

3) Ketersediaan (*Availability*). Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan, dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan/penghapusan data yang sudah tidak digunakan / kadaluwarsa untuk menghemat ruang penyimpanan.

4) Kelengkapan (*Completeness*). Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data; yakni dengan menambahkan field pada tabel atau menambah tabel baru.

- 5) Keamanan (*Security*). Agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang / pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan account (username dan password) serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan.
- 6) Kebersamaan (*Sharability*). Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multiuser (banyak pemakai), dengan menjaga / menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data (karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan) atau kondisi deadlock (karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data). ([https://ikakyuda n.d.](https://ikakyuda.n.d.))

2. Basis Data dan Definisi Definisi Basis Data.

- ✓ Representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu obyek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya
- ✓ Markas / tempat berkumpul / tempat bersarang / gudang
- ✓ Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundancy) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan

3. Basis Data dan Lemari Arsip

- ✓ Basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip dengan berbagai cara pengaturannya

- ✓ Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama; prinsipnya yakni pengaturan data/arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data/arsip.

2.6. Kriteria dan Mekanisme, Pemberian Bantuan Hibah Berbentuk Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemberian hibah sejak tahun anggaran 2012 menjadi semakin selektif dan ketat. Kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah disyaratkan oleh Permendagri dan dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemberian hibah mulai dari proses pengajuan proposal atau permohonan hibah, penganggaran oleh pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah tersebut.

Ditekankan pada Pasal 42 Permendagri tersebut, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial harus diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Pemerintah daerah baru dapat menganggarkan belanja hibah setelah peraturan kepala daerah dimaksud ditetapkan dan berlaku dengan menyesuaikan kepada ketentuan Permendagri tersebut. Berarti selain kriteria minimal yang dipersyaratkan oleh Permendagri, pemerintah daerah dapat menambahkan kriteria/persyaratan lain terkait hibah yang dinilai penting dan sesuai dengan karakteristik daerahnya selama tidak bertentangan dengan Permendagri.

Berikut penjelasan kriteria/persyaratan terkait pemberian hibah

1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA- PPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. Anggaran belanja hibah, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak dapat lagi dicantumkan secara gelondongan atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan penggunaan hibah juga secara spesifik dicantumkan dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Kriteria ini

berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya hibah untuk organisasi semi pemerintah seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, maupun organisasi semi pemerintah lainnya.

- 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah;
 - a) Pemerintah, yaitu satuan kerja dari kementerian / lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, atau sering disebut sebagai hibah kepada instansi vertikal;
 - b) Pemerintah daerah lainnya, yaitu hibah kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Perusahaan daerah, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Masyarakat, yaitu kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprofesional. Hibah kepada masyarakat ini diberikan dengan persyaratan minimal memiliki kepengurusan yang jelas

dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan

- e) Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan ini diberikan dengan persyaratan minimal telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya

3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan), berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah

daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap.

2.7. Konsep Pemberdayaan dan Strategi Pemberdayaan

Konsep Pemberdayaan dan strategi pemberdayaan Menurut Anwar (2014: 49) pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya.

Kemampuan yang dimaksud Anwar adalah mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Menurut Suharto (2014:66) dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu

- 1) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya

- 2) Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok kliem.

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kliem agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya

- 3) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam model ini.

2.8. Evaluasi

1) Definisi Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6).

Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Yunanda, 2009). Evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat

mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012:7).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat yang memiliki tolak ukur, dan hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk membuat kebijakan.

2) Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

1. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar.
3. Evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi.
4. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi.
5. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi.
6. Akuntabilitas.
7. Memberikan saran kepada user.
8. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Tujuan, Evaluasi disini dilakukan bukan tanpa tujuan, namun terdapat hal-hal yang ingin dicapai dengan melalui kegiatan ini. Secara khusus, dibawah ini merupakan beberapa tujuan evaluasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan.

- b) Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya sehingga bisa dilakukan diagnosis serta kemungkinan memberikan remedia teaching.
- c) Untuk mengetahui tingkat efisiensi serta juga efektivitas suatu metode, media, serta sumber daya lainnya didalam melaksanakan suatu kegiatan.
- d) Sebagai umpan balik serta juga informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada yang mana hal itu dapat dijadikan ialah sebagai acuan didalam mengambil keputusan di masa mendatang.

3) Fungsi Evaluasi

Kegiatan atau aktivitas evaluasi ini mempunyai beberapa fungsi yang bermanfaat bagi pihak yang melakukan evaluasi atau juga pihak yang dievaluasi. Dibawah ini merupakan beberapa fungsi evaluasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Fungsi Selektif. Fungsi selektif ini merupakan fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya; menentukan seseorang diterima kerja atau juga tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau juga tidak, dan lain sebagainya .
- b) Fungsi Diagnosa. Fungsi diagnosa ini bertujuan untuk mengetahui dapat kelebihan serta kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya seperti untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan seorang siswa didalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah.
- c) Fungsi Penempatan. Fungsi penempatan bertujuan untuk dapat mengetahui

di mana posisi terbaik seseorang pada suatu bidang tertentu. Contohnya seperti untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan itu sesuai dengan bidangnya di dalam sebuah perusahaan.

- d) Fungsi Pengukuran Keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi tersebut berfungsi untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program, termasuk juga metode yang dipakai, penggunaan sarana, serta pencapaian tujuan.

4) Tahapan Evaluasi

Dalam kegiatan atau aktivitas evaluasi ini terdapat beberapa tahapan penting yang saling berelasi satu sama lainnya. Mengacu pada pengertian evaluasi, dibawah ini merupakan beberapa tahapan-tahapan evaluasi diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Menentukan topik evaluasi, yakni kegiatan atau aktivitas penentuan topik yang akan dievaluasi. Contohnya seperti; evaluasi hasil kerja, atau evaluasi rencana kerja.
- ✓ Merancang kegiatan atau aktivitas evaluasi, yakni kegiatan mendesain proses evaluasi sehingga didalam pelaksanaannya itu tidak melewatkan hal-hal yang penting.
- ✓ Pengumpulan data, yakni kegiatan atau aktivitas mengumpulkan serta mencatat tiap-tiap informasi itu sesuai dengan perencanaan dengan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.
- ✓ Pengolahan serta analisis data, merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mengolah informasi dengan cara mengelompokkan data supaya dapat lebih mudah dalam melakukan analisis, dan juga menentukan tolak ukur waktu ialah sebagai hasil evaluasi.

- ✓ Pelaporan hasil evaluasi, merupakan membuat laporan hasil evaluasi supaya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.9. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan system yang saat ini berkembang dengan pesat bersamaan dengan pengembangan teknologi informasi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi sistem, informasi dan definisi system informasi sebagai satu kesatuan.

1) Definisi Sistem

Pengertian sistem menurut Susanto (2013:22) adalah kumpulan/grup dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik atau pun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Al-Bahra (2013:3), mengemukakan mengenai karakteristik sistem yang menyatakan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran atau tujuan.

Menurut Romney dan Steinbart (2015:3), sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasanya terbagi dalam subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen- komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi dalam sebuah rangkaian untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran.

2) Definisi Informasi

Informasi merupakan salah satu sumber daya terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Informasi diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya/penggunanya. Alat pengolahan informasi dapat meliputi elemen komputer, elemen non komputer atau kombinasinya

(Al-Bahra,2013:9). Definisi informasi menurut Susanto (2013:8) adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Menurut Gellinas dan Dull (2012:12), informasi merupakan data yang disajikan dalam suatu bentuk yang berguna terhadap aktivitas pengambilan keputusan.

Karakteristik informasi yang berkualitas menurut Gellinas dan Dull (2012:19) adalah sebagai berikut:

- a Effectiveness: berkaitan dengan informasi yang relevan dan berkaitan dengan proses bisnis yang disampaikan dengan tepat waktu, benar, konsisten dan dapat digunakan.
- b Efficiency: informasi yang berkaitan melalui penyediaan informasi secara optimal terhadap penggunaan sumber daya.
- c Confidentiality: karakteristik informasi yang berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai-nilai bisnis dan harapan.
- d Integrity: karakteristik informasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah atau tidak diizinkan.
- e Availability: suatu karakteristik dari informasi yang berkaitan dengan

informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh proses bisnis baik pada saat ini, maupun di masa mendatang, hal ini juga menyangkut perlindungan sumber daya yang diperlukan dan kemampuan yang terkait.

f Compliance: yaitu karakteristik informasi yang berkaitan dengan mematuhi peraturan dan perjanjian kontrak dimana proses bisnis merupakan subjeknya, berupa kriteria bisnis secara internal maupun eksternal.

g Reliability: karakteristik informasi yang berkaitan dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan entitas dan menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan definisi dan karakteristik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki bentuk dan makna yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang berkualitas bagi penggunaannya. Informasi memiliki karakteristik seperti efektif, efisien, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan reliabilitas atau keterpercayaan.

2.10. Efektivitas

Efektivitas merupakan wujud dari kemampuan untuk mendayagunakan sesuatu secara tepat sesuai dengan standar yang jelas dan dapat diterima secara universal. Dalam konteks ini efektivitas menunjukkan taraf mencapai tujuannya secara ideal, tarap efektivitasnya dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti. Pandangan ini memfokuskan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan ukuran yang pasti.

Efektivitas adalah derajat tingkat pencapaian atas hasil yang diinginkan (the degree to which something is successful in producing a desired result). Sedangkan kaitannya dengan efektivitas biaya (cost-effectiveness), Woodhall dalam Sembiring, mendefinisikan analisis keefektivitasan biaya sebagai teknik analisis untuk mengukur hubungan antara input atau biaya suatu proyek/kegiatan dengan hasil/output tertentu. Analisis efektivitas biaya berbeda dengan analisis manfaat biaya CBA mengukur biaya dan manfaat suatu proyek/kegiatan dalam satuan uang yang dideskripsikan dalam tingkat pengembalian (rate of return).

Kriteria Efektivitas Organisasi

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: pertama, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. Ketiga, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan berlabar, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik

2.11. Efektivitas Pelayanan Publik

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989: 149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kenyataannya, sulit sekali merinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektivitas dalam suatu organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja (Richard M. 1985, 1)

Richard M. Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu :

1. Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai;
2. Perspektif sistematis : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi;
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi (Richard M. 1985, 4-7)

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit

banyaknya pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Georgepoulos Tenenbaum (Richard M. Steers, 1985:20) berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan. Chester I. Barnard (dalam Gibson, 1994:27), mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.

Definisi lain yang dapat dijadikan acuan ialah menurut Emerson (dalam Handayani, 1985:16) Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.

Katz dan Kahn (Richard M. Steers, 1985:48) berpendapat bahwa efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan bahwa efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara. Berkaitan dengan konsep efektivitas. The Liang Gie (1988:34) berpendapat :

Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Sondang P. Siagian (1981:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. M. Manullang (1986:214) berpendapat :

Prestasi atau efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perorangan, atau dengan kata lain bila tiap anggota secara terkoordinasi melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik, efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.

Dari bermacam-macam pendapat di atas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Moenir (2000:7) mengatakan bahwa pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Jadi dalam memberikan pelayanan yang efektif dapat berarti tercapainya tujuan pelayanan yang telah ditetapkan organisasi dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang didapatnya. Weber (dalam Azhar Kasim, 1993:9) mengatakan :

Bahwa konsep birokrasi yang rasional sangat mengandalkan pada peraturan-peraturan dan prosedur yang kesemuanya dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan dan terlaksananya nilai-nilai dan norma-norma yang diinginkan.

Dengan melihat konsep tentang pelayanan publik yang telah diuraikan di atas, bahwa pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat atau kelompok yang dilayani dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Maka, dapat dikatakan bahwa efektivitas pelayanan aparat adalah tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh aparat dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi untuk mengukur efektivitas

pelayanan maka kita dapat melihatnya dari optimasi tujuan, perspektif sistematika dan perilaku pegawai dalam organisasi.

2.12. Efektivitas Pelayanan

Suasana iklim kerja tempat pegawai bekerja perlu diperhatikan. Iklim kerja dalam suatu organisasi merupakan suatu sifat atau ciri yang dirasakan dalam lingkungan kerja dan timbul karena kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar dan dianggap mempengaruhi kelancaran aktivitas organisasi. Bagaimana cara pegawai berinteraksi dengan masyarakat pada saat melayani, bagaimana hubungan antar pegawai dalam organisasi tersebut, sehingga pelayanannya menjadi efektif. Dalam hal ini yang dimaksud adalah iklim organisasi dalam kantor kecamatan tempat aparat kecamatan melayani kepentingan masyarakat.

Hal ini sangat penting guna mendukung tercapainya pelayanan yang efektif terhadap masyarakat. Iklim kerja yang baik dalam suatu organisasi sangat penting artinya karena efektivitas setiap organisasi sangat ditentukan oleh iklim kerja yang ada dalam organisasi dimana setiap pegawai bekerja, dalam hal ini adalah organisasi kecamatan. Seperti diungkapkan oleh Steers bahwa: iklim memang merupakan faktor pengaruh yang penting bagi prestasi dan kepuasan kerja.: (Richard M. 1985, 130). Dari pendapat Steers tersebut kita dapat melihat bahwa iklim kerja sangat berpengaruh pada prestasi dan kepuasan kerja pegawai yang dalam penelitian ini adalah tercapainya efektivitas pelayanan aparat kecamatan.

2.13 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Goal setting theory merupakan salah satu bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. *Goal setting theory* didasarkan pada bukti yang berasumsi bahwa sasaran (ide-ide akan masa depan; keadaan yang diinginkan) memainkan peran penting dalam bertindak. Teori penetapan tujuan yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan (Birnberg dalam Mahennoko, 2011).

Menurut teori ini “salah satu dari karakteristik perilaku yang mempunyai tujuan yang umum diamati ialah bahwa perilaku tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, sekali seseorang mulai sesuatu (seperti suatu pekerjaan, sebuah proyek baru), ia terus mendesak sampai tujuan tercapai. Proses penetapan tujuan (*goal setting*) dapat dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri/diwajibkan oleh organisasi sebagai satu kebijakan (Wangmuba dalam Ramandei, 2009). *Goal setting theory* menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya.

Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsenkuensi kinerjanya. Teori ini juga menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat

meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka diasumsikan bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal harus ada kesesuaian tujuan individu dan organisasi. Dengan menggunakan pendekatan *goal setting theory*, kinerja pegawai yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Instrument Penelitian Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun instrument penelitian yang peneliti gunakan untuk melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui pedoman observasi, pedoman wawancara, pengkajian dan telaah dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

Oleh sebab itu, dalam menemukan, Evaluasi pemberian Dana hibah untuk sekolah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. peneliti harus menemukan data-data terkait dengan penelitian secara mendalam, dan tidak menekankan pada penilaian yang bersifat menggeneral, namun lebih menekankan pada makna.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian, sumber data primer dalam penelitian berupa hasil observasi, wawancara dengan responden, serta dokumentasi yang ada di Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

2. Data Sekunder

Data sekundernya adalah berbagai sumber data lain yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini nantinya. Diantaranya, internet, jurnal, buku, majalah, koran dan sebagainya

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan metode kegiatan person oleh peneliti untuk menjangkau dan memperoleh data dari kegiatan person secara lengkap tentang Evaluasi Pemberian Dana hibah untuk sekolah Terhadap Lembaga/ Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi / pengamatan, interview dan telaah dokumen (Sugiyono (2015: 308).

1. Wawancara wawancara bermaksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain. Wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dilakukan kepada informan dari aparat-aparat kampung yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Untuk memudahkan dalam mendapatkan data dan jawaban penelitian. Peneliti menggunakan tipe wawancara semi terstruktur..
2. Observase

Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengencap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung.

3. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka peneliti menggunakan berbagai media dan sumber seperti koran, majalah, buku, internet, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian ini adalah kualitatif dan pada penelitian ini dilakukan pada Proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Sugiyono 2008 ; 333-345) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami||. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan pamarikan kesimpulan" (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif 2008), langkah-langkah tersebut antara lain

1. Reduksi Data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara dan observasi direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian ini. Proses mereduksi data dalam penelitian ini merupakan bagian dari analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu dan mengorganisasi data dengan baik sehingga proses kesimpulan akhir nanti terlaksana dengan baik.

2. *Penyajian Data (Display Data)* Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian ketiga dan merupakan unsur penting dalam teknik analisis data pada penelitian kualitatif. Dari proses pengumpulan data, peneliti mulai mencatat semua fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut (Moleong, 2014 ; 237) Analisis data melibatkan upaya mengidentifikasi ciri-ciri sesuatu objek dan kejadian oleh anggota-anggota budaya. Makna demikian biasanya divalidasi oleh para anggota budaya sebelum hasil akhirnya dipaparkan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Proses analisis data dalam penelitian ini, dimana peneliti menggunakan pendapat Miles dan Huberman (2014) yaitu; pengumpulan data, reduksi data, display data, kesimpulan atau verifikasi.

3.5. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan triangulasi atau Keabsahan Penelitian, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis kembali melalui teknik triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.

Dari hasil triangulasi ini maka peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara terdapat adanya kesinkronan antara pengamatan peneliti tentang Evaluasi Pemberian Dana hibah untuk sekolah Terhadap Lembaga/ Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Dan ini terjawab pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan informasi yang tidak jauh berbeda dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dan hasil wawancara dengan informan.

Peneliti dalam menemukan keabsahan temuan tentang penerima manfaat menjadi bagian evaluasi pemberian Dana hibah untuk sekolah Terhadap Lembaga/ Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, maka, teknik yang digunakan dalam pemeriksaan adalah;

Perpanjangan keikutsertaan

pengamat Trianggulasi

(Tohirin, 2013: 72)

3.6. Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan maksud memahami fenomena, persepsi, motivasi, tindakan dan pandangan responden dalam bentuk cerita rinci dari hasil pengamatan dilapangan terkait program-program pemerintah dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial.

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian Dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal, antara lain :

- 1) Manfaat pemberian dana bantuan Sosial Dan Hibah Terhadap Lembaga/ Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Faktor determinan dalam Dana hibah untuk sekolah Terhadap Lembaga/ Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Optimalkan penyaluran Dana hibah untuk sekolah Terhadap Lembaga/ Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

3.7. Sumber Data dan Informan Penelitian

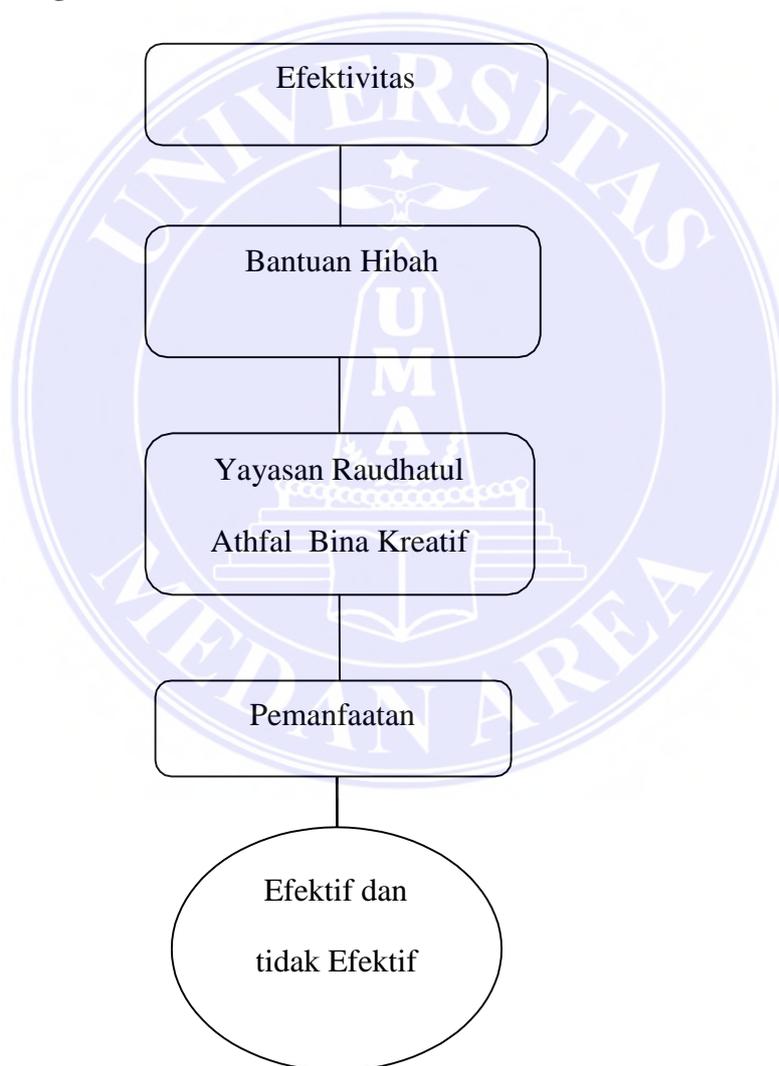
Sumber Data dan Informan Penelitian Pengambilan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data antara lain: Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik observase, wawancara kepada responden.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelusuran dan penelahan studi kepustakaan, referensi-referensi, Peraturan Perundang-

undangan. Peneliti memperoleh data melalui beberapa informan antara lain adalah;

- 1) Yayasan Penerima Hibah Pendidikan
- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batang Kuis
- 3) Informan lain yang dianggap mengetahui tentang hibah pendidikan.

3.8. Kerangka Pikir



3.9. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti menyimpulkan kajian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

- 1) Riezky Hadhisti Harahap, 2019. Judul: Implementasi Dana Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Apbd Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyaluran dana bansos berdasarkan permendagri nomor 39 tahun 2012, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD terhadap transparansi penyerapan anggaran hibah dan bantuan sosial di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, hasil penelitian, dan data-data yang dikumpulkan yang berasal dari Pemerintah Kota Pontianak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan tetapi dalam proses pelaksanaan masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian hibah atau bantuan sosial kemasyarakatan harus berdasarkan atas

peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam proposal, tidak wajib dan tidak mengikat, bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan menerima hibah. Kedua faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dipengaruhi oleh indikator Penyajian Laporan Keuangan, indikator

Aksesibilitas Laporan Keuangan dan indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

- 2) Iman Amaliah, Jurnal 2019 judul: Identifikasi Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Dokumen Perencanaan Dalam Upaya Pemanfaatan Dana Hibah Desa : Suatu Survey di Desa Mekarwangi Kecamatan Cibatu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan aparatur desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan guna pemanfaatan dana hibah desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survey lapangan dan FGD. Adapun subyek penelitian ini adalah seluruh aparatur desa termasuk utusan dusun-dusun yang ada di wilayah Kecamatan Mekarsari yang berjumlah 33 orang ditambah utusan pemuka masyarakat sebanyak 10 orang. Hasil pengamatan di lapangan, FGD dan wawancara diketahui bahwa pengetahuan perangkat desa sudah cukup baik namun masih agak kurang dalam pemahaman. Hal tersebut nampak dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen dilakukan, namun pengetahuan terkait alokasi dana desa, penyusunan laporan keuangan yang sesuai aturan aparat desa masih cukup rendah. Efeknya muncul berbagai ketakutan dari aparatur desa. Kepemimpinan desa sudah cukup baik dalam

mengawal alokasi dana desa dimana dimulai dari sosialisasi anggaran, penyusunan kegiatan sesuai kegiatan yang akan dilakukan sampai pada keputusan pendanaan untuk setiap kegiatan yang akan didanai. Perlu adanya pendampingan yang berkelanjutan dari berbagai pihak seperti penyusunan laporan dana desa yang berbasis teknologi informasi.

- 3) Rhonda Remma Prastama, Jurnal Administrasi Publik, 2013. Judul Implementasi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat. Tujuan penelitian Implementasi pengelolaan dan penggunaan dana hibah berdasarkan peraturan walikota malang no. 10 tahun 2010 tentang pedoman penggunaan dana hibah kepada masyarakat (studi pada kelurahan ciptomulyo kecamatan sukun kota malang). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah pada Kelurahan ciptomulyo kota Malang, berdasarkan pada Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010. Bagaimana implementasinya pengelolaan dan penggunaan dana hibah di lapangan yang di indikasikan dalam efektifitas, efisiensi, transparansi, dan juga apakah tujuan dana hibah dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tercapai, serta faktor-faktor pendukung apa yang mendorong implementasi dana hibah Hasil dari pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa di dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang tercantum sudah sesuai dengan apa yang terkandung di dalam peraturan walikota Malang no.10 tahun 2010, yang di tandai dengan efisiensi, efektifitas, dan Transparansi, Di dalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah

terlaksana secara utuh akan tetapi masih saja ada yang kurang di dalam pemberdayaan masyarakat, di dalam hal ini pemberdayaan masyarakat masih kurang di dalam bidang pelatihan, dan juga bidang pengembangan home industry yang ada di daerah, kemudian jika bicara di dalam partisipasi setiap elemen masyarakat sudah bergerak dan mau untuk ikut berpartisipasi di dalam program dana hibah ini. Mulai dari mereka menyumbang pikiran pada proses perencanaan, dana atau material sampai pada sumbangan berupa tenaga pada proses pelaksanaan dan pengawasan.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan penelitian tidak ada yang membicarakan tentang evaluasi pemberian Dana hibah untuk sekolah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

3.10. Kategorisasi Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir peneliti maka kategorisasi ini mencakup:

1. Komunikator; Sebagai sumber yang memberikan informasi yang didasari dari keilmuan yang di miliki, serta dipahami. Maka evaluasi dan manfaat administrasi publik dalam semua peristiwa adalah komunikator yang merupakan aktor utama. karena merupakan sumber pemberi pesan untuk kemudian mendapatkan respon dari lawan bicaranya. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri oleh satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok, misalnya dalam dunia pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga atau negara.

2. Pesan; Suatu proses komunikasi yang disampaikan kepada si pengirim kepada penerima pesan berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki.
Sifat dari pesan merupakan abstrak, namun setiap manusia yang memiliki akal yang dikontrol secara individu membentuk sebuah simbol-simbol tersendiri yang tidak dibatasi orang lain seperti, suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, tulisan dan sebagainya. setidaknya pesan berfungsi untuk mewujudkan motif komunikasi, apa yang dipikirkan dan dirasakan, maka disebut komunikasi verbal dan non verbal.
3. Media; Sebuah alat yang digunakan oleh si pengirim pesan dalam berinteraksi dengan penerima pesan, dalam hal ini media nirwana Media komunikasi juga diartikan sebagai tempat pemindahan pesan dari sumber kepada penerima yang dapat menggunakan berbagai alat, tergantung dengan komunikasi apa yang digunakan. Seperti tabloid, majalah, koran, buletin, radio, televisi, jurnal, organisasi sosial dan sebagainya. atau jalan komunikasi tatap muka, saluran atau jalan yang dilalui pesan komunikator untuk sampai ke komunikannya adalah gelombang cahaya atau gelombang cahaya atau gelombang suara.
4. Komunikasi; Sebagai pihak yang menerima pesan yang dikirimkan melalui sumber yang diterima. yang terdiri dari satu orang atau lebih, bisa juga bentuk kelompok masyarakat atau negara.
5. Efek; Pengaruh yang diterima oleh pengirim pesan dan menimbulkan efek komunikasi di dalam pikiran kemudian menjadi penguat keyakinan dan menghasilkan interaksi pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang. Dari kelima kategorisasi peneliti menyimpulkan bahwa untuk mencapai manfaat

administrasi yang efektif dalam penelitian ingin melihat bagaimana Evaluasi Pemberian Dana hibah untuk sekolah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Manfaat pemberian dana hibah untuk sekolah pada Lembaga/Yayasan Pendidikan RA Bina Kreatif Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
 - 1) Kurang efektif sebab dana yang diterima tidak sesuai dengan Permohonan Anggaran yang di ajukan, sehingga pihak yayasan atau pengelola harus menghitung ulang anggaran yg mana yg terlebih dahulu harus dikerjakan atau diutamakan pengerjaannya sehingga dapat membantu proses belajar mengajar dengan baik dan nyaman.
2. Terjadi Kendala-kendala dalam Pemanfaatan Dana Hibah oleh sekolah RA Bina Kreatif pada pemberian dana hibah untuk sekolah
 - a) Dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbatas sehingga pemanfaatan Dana belum seluruhnya mencukupi kebutuhan Yayasan Raudhatul Athfal Bina Kreatif maka perlu peran serta Yayasan/Sektor lain yang dapat memberikan bantuan.
 - b) Kendala dalam pelaksanaan permohonan hibah memerlukan proses waktu yang sedikit lama, karena melewati beberapa tahap. Dan ini menyebabkan proses pencairan dana hibah yang harus dilalui memerlukan tahapan-tahapan, yaitu permohonan bantuan dengan nomor : 025/RA-BK/SEK/XI/2018. Tanggal. 12 November 2018, SK Gubernur terbit dengan nomor : 188.44/76/KPTS/2019. Tanggal. 18 Februari 2019,

dengan surat Gubernur nomor : 518/SP/TU/Sokesra/2019. Tanggal. 25

Februari 2019, perihal pemberitahuan dan melengkapi berkas pencairan

3. Kepala Raudhatul Athfal Bina Kreatif telah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dengan Nomor : 075/RA-BK/SEK/V/2019. Tanggal, 20 Mei 2019, perihal penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bantuan Hibah APBD-SU T.A. 2019.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Hubungan yayasan dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan harus dibina dengan baik, agar dapat informasi dana hibah dan yang lainnya lebih cepat.
2. Perencanaan usulan bantuan hibah yang matang dengan cara pendekatan strategi terhadap berbagai unsur yaitu orang tua siswa, guru dan pemerintah.
3. Ajang silaturahmi antara guru dengan orang tua murid semakin ditingkatkan dalam rangka membangun respon positif, menjadikan modal dasar Yayasan RA Bina Kreatif dalam mempertahankan eksistensi sekolah.
4. Perlu adanya upaya serius dalam mengatasi pemanfaatan pemberian Bantuan hibah di Yayasan RA Bina Kreatif.

Para pelaksana penerima bantuan seyogyanya di berikan pelatihan dan bimbingan teknis yang menangkut pengelolaan dan pelepasan pertanggung jawaban,

5. Pertanggung jawaban disampaikan paling lama 3 Bulan setelah pencairan

disampaikan ke Gubernur Sumatera Utara. Bila pencairan dana hibah terjadi di akhir tahun atau kegiatan yang sudah dilaksanakan maka Laporan Pertanggung Jawabannya harus segera dikerjakan di awal tahun.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. oos. *Pemeberdayaan Masyarakat di era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Evaluasi Program pendidikan Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Blogsport.co.id. "Artikel Makalah-Belajar." *Teori dan Model Komunikasi Organisasi*, 2012.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu komunikasi*. Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998 .
- David., Fred. R. *menejemn strategi*. Jakarta: Salemba empat, 2010.
- Dharma, Kesuma, dan Teguh, Ibrahim. *Struktur Fudamental Pedagogik*. 1. Edited by M. Danda Wildani. Vol. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Dirman, Cicih juarsih. *Komunikasi Dengan Peserta Didik*. Jakarta: PT Redika Cipta, 2014.
- Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantora Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Fauzanh. *makalah penyuluhan dan komunikasi*. blog.co.id/2013, 2013.
- Griffin, EM. "A First Look At Communication Theory." By Mc.Graw Hill. New York: www..Afirtlook.com/meet_em, 2003.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*, trans. oleh Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009),
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Hasbiansyah. *effective communication*. Unisba Bandung: Moss, Stewart L.tubbs dan Sylvia, 1996.
- <https://ikakyuda.wordpress.com>. *materai pendidikan basis data dan defenisi tujuan pemenafaatan basis data*. worspress.com, n.d.
- <https://web.facebook.com/notes/ika-namapt/fungsi-dan-tujuan-ikatan-alumni-untukpengembangan-sekolah>. face books, n.d.

- Khomson, Ali. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 32. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Morissan. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Vol. 1. Jakarta: Prenandamedia, 2014.
- Notowidagdo, Rahiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Tagwa*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Onong, Uchjana. *Komunikasi teori dan praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Permendagri. *Nomor 32 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012*. 2011.
- Rahardjo, Mudjia. "mudjiarahardjo.com." *mudjiarahardjo.com/artikel*. November 17, 2012. www.mudjiarahardjo.com (accessed Januari 3, 2016).
- Rakhmat, jalaluddin. *psikologi komunikasi*. 1989.
- Richard M., Steers. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985. Robbins, Stephen. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- Ruben Breat.D, & Lea.P,Stewart. *Komunikasi dan Prilaku Manuasia*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2013.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Adminstrasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Siagian, Sondang. P. *bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Siregar, Ashadi. "Kurikulum dan Pengembangan Studi Komunikasi." *Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UMY*. Yogyakarta, Juni 23, 1997.
- Sitikholidah. "Komunikasi Pendidikan." *http:Blog.Umy.Ac.Id*. 11 18, 2012.
- <http://blog.Umy.ac.id> (accessed April 17, 2013).

- Soleh, Chabib. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kombinasi* . Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharto, Edi. *memebangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi pembangunan kesejahteraan Sosial dan pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Sumodiningrat, Gunawan dan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998.
- T.Hani, Handoko. *Menejemen edisi kedua cetakan ke tujuh*. Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Tohirin. *Penelitian Kualitatif dalam pe3ndidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- UU RI, Presiden. "www.hukumonline.com." *hukumonline.com*. Juli 8, No. 20 Thn 2003. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/uu-no-20-tahun-2003-sistempendidikan-nasional.pdf> (accessed Januari 22, 2016).
- Warsita, Bambang. *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Weber, Max. "Teori Birokrasi." *Isakuikikang.blogspot.co.id*, 2014.
- Wirawan. *Evaluasi, Teori, Model Standar, Aflikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Wiryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. jakarta: Grameja Wilasarana Indonesia, 2005.